



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I
TAHUN 2019**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2019 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dengan maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel.

Tujuan dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja dilingkungan Badan Pengawasan. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan loyalitas kita dapat lebih ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Harapan kami, adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli dalam usaha-usaha perbaikan sistem pengawasan, peningkatan implementasi pengawasan dan internalisasi nilai-nilai pengawasan sehingga berdampak pada terwujudnya budaya pengawasan dilingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



NUGROHO SETIADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal diberikan tugas untuk melakukan seluruh proses kegiatan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan efektifitas tugas tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Sejalan hal tersebut diatas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2019, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 167 orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 62 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 89 orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf dan Honorer dengan rincian sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 orang
- Pejabat Eselon IV : 15 orang

B. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 43 orang
- Hakim Yustisial : 19 orang
- Auditor : 21 orang
- Auditor Kepegawaian : 8 orang
- Pustakawan : 1 Orang
- Analis Kepegawaian : 1 orang
- Pranata Komputer : 2 orang
- Arsiparis : 1 Orang

C. Staf : 30 orang

D. Honorer : 16 orang

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 1.942 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 211 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 781 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 18 pengaduan.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatannya yaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA K/L, Reviu RKBMN Online, Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ, Pemeriksaan Keuangan, Audit Pengadaan Barang/Jasa, *Liaison Officer* (LO) dan Reviu Revaluasi BMN.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

• Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 28 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 19 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 3 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 8 satker.

• Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari KPK, Tim BPKP Pusat dan Tim BPKP Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan

Kerja yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Banten.

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai A, 52 Satker (70,27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (18,91%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC.

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik) hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97 (sembilan puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 59 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 27 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker.

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp42.869.200.522,00, nilai rekomendasi sebesar Rp33.997.443.502,00. Hingga Semester II tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00. sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.800.266.156,00. atau sebesar 14,12% dan nilai sebesar Rp583.806.372,00 atau sebesar 1,72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebesar Rp32.588.694.000,00.

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester II tahun 2019.

10. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yaitu:

- a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu Bali yang diikuti oleh 64 peserta terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama. Bangka Belitung yang diikuti oleh 28 peserta terdiri dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Manado yang diikuti oleh 60 peserta terdiri dari Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama. Batam yang diikuti oleh 38 peserta terdiri dari Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama.
- b) Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Makassar yang diikuti oleh 124 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Wakil Ketua Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Banten dan DKI Jakarta yang diikuti oleh 72 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- c) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Jambi yang diikuti oleh 63 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Jambi
- d) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) telah dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Banjarmasin yang diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vi
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	19
C. Sistematika Penyajian	23
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	24
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	24
1. Visi dan Misi	24
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
C. Rencana Kinerja Tahun 2019	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	27
E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan	32
III. Akuntabilitas Kinerja	34
A. Pengukuran Kinerja	34
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	35
C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja	48
IV. Penutup.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Strategis 2015– 2019
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP
5. Rencana Kinerja Tahun 2018, 2019
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawas fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kemanfaatan dan penyelenggaraan lebih baik. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 167 orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer. Jumlah aparatur pada Badan Pengawasan yang berjumlah 167 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 62 orang, tenaga non teknis yudisial 89 orang dan tenaga honorer 16 orang.

Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI pada tahun 2019 telah mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 30 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Diklat dan Bimtek Tahun 2019

NO	NAMA BIMTEK	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA	TUJUAN
1	Pelatihan dan Bimtek Aplikasi SIWAS VERSI 3.0 DAN E-Monitoring Reguler	20 orang	EU-UNDP SUSTAIN	Peningkatan Kompetensi SDM
2	Sosialisasi Kendali Mutu dan Telaah Sejawat	130 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
3	Sosialisasi Evaluasi SKP	120 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
4	Sosialisasi E-LHKPN	168 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
5	Sosialisasi SIWAS Versi 3	121 orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
6	Sosialisasi Review Angka Dasar Pagu Indikatif 2020	2 orang	Kementrian Keuangan RI	Peningkatan Kompetensi SDM
7	Diklat Bendahara Penerimaan	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
8	Diklat Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
9	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
10	Diklat Keprotokolan Tingkat Manajerial	2 orang	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
11	Diklat Penajezangan Auditor Madya secara E-Learning	2 orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
12	Diklat Substantif Manajemen Resiko	30 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
13	Sosialisasi Pokok – Pokok Tata Cara Revisi Anggaran LA 2019	2 orang	Kementrian Keuangan RI	Peningkatan Kompetensi SDM

14	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
15	Pelatihan Audit Forensik dan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	2 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
16	Diklat Keprotokolan Tingkat Manajerial Tahun 2019	1 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
17	Sosialisasi Sistem Pelaporan Triwulan Aksi PK Tahun 2019-2020	2 Orang	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
18	Sosialisasi Aplikasi e-kinerja	2 Orang	Sekretaris MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
19	Bimbingan Teknis untuk para Counterpart Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6 Orang	Badan Urusan Administrasi MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
20	Diklatpin Tingkat IV Angkatan VIII dan IX	2 Orang	Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	Peningkatan Kompetensi SDM
21	Pembinaan Teknis tata Cara perberhentian dan pensiun pegawai Mahkamah Agung RI	3 Orang	Badan Urusan Administrasi MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
22	Bimtek Teknis Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online dan Sharing Session	4 Orang	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
23	Pelatihan Penilaian Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK)	2 Orang	Litbang Diklat Kumdil MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
24	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Katagori Keahlian Angkatan III Tahun 2019	1 Orang	Arsip Nasional	Peningkatan Kompetensi SDM

25	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Pengawasan MARI	153 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
26	Sosialisasi Peraturan Cuti, Standar Kompetensi & SIKEP Versi 3.0	55 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
27	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1 Orang	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
28	Pelatihan Mobile Proqraming	7 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
29	Bimtek Manajemen Arsip Inaktif dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)	1 Orang	BUA MARI	Peningkatan Kompetensi SDM
30	Pelatihan Machine Learning	6 Orang	Badan Pengawasan MARI	Peningkatan Kompetensi SDM

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan, dengan rincian :

A. Penanganan Pengaduan

- 1) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.942 pengaduan
- 2) Pengaduan dari Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 211 Pengaduan
- 3) Pengaduan dari Aplikasi SIWAS sejumlah 781 Pengaduan
- 4) Pengaduan dari SATGAS sejumlah 18 Pengaduan

B. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

- 1) Pengaduan masih proses penyelesaian sejumlah 996 pengaduan
- 2) Pengaduan yang selesai diproses sejumlah 1.956 pengaduan
 - Diperiksa Tim Bawas sejumlah 290 Pengaduan
 - Delegasi ke Tingkat Banding sejumlah 52 Pengaduan
 - Delegasi ke Tingkat Pertama sejumlah 779 Pengaduan
 - Memorandum/ Delegasi Internal sejumlah 35 Pengaduan
 - Dijawab Surat sejumlah 785 Pengaduan
 - Diarsipkan sejumlah 15 Pengaduan

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (*tidak fair*), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- a. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum;

- b. Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan, yaitu:

- a) Hakim, sejumlah 85 orang
- b) Hakim Ad Hoc, sejumlah 1 orang
- c) Panitera, sejumlah 17 orang
- d) Sekretaris, sejumlah 2 orang
- e) Panitera Muda, sejumlah 14 orang
- f) Panitera Pengganti, sejumlah 20 orang
- g) Jurusita, sejumlah 3 orang
- h) Jurusita Pengganti, sejumlah 6 orang
- i) Pejabat Struktural, sejumlah 9 orang
- j) Staf, sejumlah 19 orang
- k) Calon Hakim, sejumlah 3 orang

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 orang hakim, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	JENIS HUKUMAN/KETERANGAN
1	R M S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbt (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Mrh)	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
2	S S, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Stb	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
3	M Y S, S.H., M.H.	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Tjk	Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat
4	Letkol Chk. H M, S.H., M.H.	Kadilmil Mks	Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<p>Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali meliputi reviu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada bulan Februari 2019.2) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2019 pada bulan Juli 2019.3) Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun Anggaran 2018 pada bulan November 2019. <p>Catatan: Laporan Keuangan MA RI TA 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.</p> <p>Pembentukan Tim Penilai PIPK didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 683/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan MA RI sehingga Reviu PIPK difokuskan pada penguatan Tim Penilai PIPK tersebut yang baru memulai kegiatan Penilaian PIPK pada bulan November 2019.</p>
2	Reviu RKA K/L	<p>Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian).- Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM,

		<p>pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume <i>output</i> riil aset (BMN) <i>existing</i> sebagai basis data pengusulan alokasi. <p>Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.</p>
3	Reviu RKBMN Online	Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2019 di Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2021.
4	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 100,59% dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Pegawai mencapai 108,36% senilai Rp.3.269.295.616.760,00. Belanja Barang mencapai 86,08% senilai Rp.646.400.865.891,00. Belanja Modal mencapai 46,13% senilai Rp.78.384.540.502,00. <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 84,03 yakni Predikat Kualitas Belanja Baik.
5	Pemeriksaan Keuangan	Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti rugi (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat

		perbaikan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan sehingga diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya.
6	Audit Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Pengadaan Barang/Jasa tahun ini dilakukan melalui dua pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik belum selesai 100% dilakukan melalui <i>Probity Audit</i> dan untuk pekerjaan fisik telah mencapai 100% dilakukan melalui Audit Pengadaan Barang/Jasa. - Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat penyelesaian pembangunan yang berpotensi selesai tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan. - Pemanfaatan pengadaan berbasis elektronik melalui <i>e-purchasing</i> telah optimal.
8	<i>Liaison Officer</i> (LO)	<p>Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan beberapa kali penugasan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 37/ST/V-XVI.1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah selama 65 (enam puluh lima) hari. 2. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 156/ST/V-XVI.1/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta selama 10 (sepuluh) hari.

		<p>3. Sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 196/ST/V-XVI.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara selama 45 (empat puluh lima) hari.</p> <p>4. Penugasan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019.</p> <p>5. Penugasan pemantauan penyelesaian kerugian negara semester I Tahun 2019 dan Semester II tahun 2019.</p> <p>Untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut, kesepahaman hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara BPK dengan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, serta untuk memperoleh capaian penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK sesuai rekomendasi dan penyelesaian kerugian negara diatas 80%, maka diperlukan adanya <i>Liaison Officer (LO)</i> dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas seluruh penugasan BPK pada Mahkamah Agung RI.</p>
9	Reviu Revaluasi BMN	<p>Walaupun tidak memiliki target kinerja tahun anggaran 2019, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada beberapa wilayah, seperti Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Timur, Wilayah Kalimantan Barat, Wilayah Maluku dan Wilayah Jayapura. Badan Pengawasan juga telah melaksanakan reviu atas penilaian kembali BMN pada Unit Akuntansi Pengguna</p>

		<p>Barang Mahkamah Agung RI, dilaksanakan atas data sampling pemeriksaan BPK tahun 2018 sejumlah 1027 NUP BMN.</p> <p>Secara umum hasil pelaksanaan revidu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revidu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Revidu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	--	--

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 28 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 19 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 3 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 8 satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 136 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan,
- 2) Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 322 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
- 3) Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 213 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, dll
- 4) Administrasi Umum, temuannya sejumlah 662 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya Indikasi kemahalan harga, dll.
- 5) Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 181 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), dll

b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari KPK, Tim BPKP Pusat dan Tim BPKP Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Banten.

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk:

- Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
- Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
- Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel 1.4.1 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah I

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	1	-	-	-
3	>70 – 80	BB	7	7	1	1
4	>60 – 70	B	1	2	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Tabel 1.4.2 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah II

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)							
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	1	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	6	4	-	1	1	7
4	>60 – 70	B	1	1	2	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-	-	-

6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Tabel 1.4.3 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah III

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	4	8	1	-
4	>60 – 70	B	4	1	-	-
5	>50 – 60	CC	1	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Tabel 1.4.4 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	3	-	-
3	>70 – 80	BB	3	1	-	-
4	>60 – 70	B	-	1	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai A, 52 Satker (70,27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (18,91%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC.

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik) hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

**Tabel 1.4.5 Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2018 Satker Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding
(Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2019)**

NO.	NAMA SATKER	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN KINERJA	SKOR	KATEGORI
		BOBOT 30%	BOBOT 25%	BOBOT 15%	BOBOT 10%	BOBOT 20%		
1	BADAN PENGAWASAN	22,56	19,38	12,80	7,75	16,25	78,74	BB
2	BUA	15,05	17,58	12,00	7,75	11,67	74,05	BB

3	KEPANITERAAN	23,92	19,72	13,34	5,75	13,33	76,06	BB
4	DITJEN BADILAG	24,88	20,38	12,52	5,50	15,00	78,28	BB
5	DITJEN BADILUM	21,27	17,73	10,61	5,50	15,00	70,11	BB
6	DITJEN BADIMILTUN	22,43	18,99	10,88	5,50	12,29	70,09	BB
7	BAUTBANG DIKLAT KUMDIL	24,55	19,38	12,80	5,50	15,00	77,23	BB
8	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	24,42	18,22	12,14	7,21	15,00	76,99	BB
9	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	23,53	17,84	12,19	7,54	10,63	71,73	BB
10	PENGADILAN TINGGI MEDAN	21,90	18,36	10,64	7,33	10,63	68,86	B
11	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	24,42	18,22	12,61	7,96	15,00	78,21	BB
12	PENGADILAN TINGGI JAMBI	22,72	18,48	11,53	7,00	13,33	73,06	BB
13	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	25,02	20,27	12,00	8,08	15,00	80,37	A
14	PENGADILAN TINGGI PADANG	22,72	19,75	11,30	6,75	11,67	72,19	BB
15	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	23,98	20,27	12,23	7,96	13,96	78,40	BB
16	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	24,42	18,22	11,91	7,21	15,63	77,39	BB
17	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	24,41	19,36	12,00	7,75	15,00	78,52	BB
18	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	24,31	19,00	10,88	7,08	13,75	75,02	BB
19	PENGADILAN TINGGI BANTEN	22,54	18,63	11,67	7,33	15,00	75,17	BB
20	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	20,50	15,01	12,23	7,75	15,00	70,49	BB
21	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	23,47	18,63	11,95	7,33	13,96	75,34	BB
22	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	20,27	15,42	11,16	5,50	10,00	62,35	B
23	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	25,58	18,89	11,16	7,50	13,96	77,09	BB
24	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	17,50	13,75	9,47	5,88	12,29	58,89	CC
25	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	21,43	14,01	12,23	7,13	15,00	69,80	B
26	PENGADILAN TINGGI MANADO	20,97	15,68	9,47	5,83	8,33	60,28	B
27	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	22,96	19,38	11,67	7,00	10,00	71,01	BB
28	PENGADILAN TINGGI PALU	20,01	16,06	12,23	7,13	12,29	67,72	B
29	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	22,17	17,85	12,52	7,54	12,29	72,37	BB
30	PENGADILAN TINGGI KENDARI	20,33	18,64	11,44	7,42	12,29	70,12	BB
31	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	22,74	19,38	10,69	7,00	10,00	69,81	B
32	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	23,40	19,75	12,23	7,33	15,00	77,71	BB
33	PENGADILAN TINGGI KUPANG	23,43	19,00	11,72	6,71	11,88	72,74	BB
34	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	21,54	18,89	11,58	7,00	14,58	73,59	BB
35	PENGADILAN TINGGI MATARAM	25,09	20,16	12,28	7,75	15,21	80,49	A
36	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	23,62	19,36	9,89	7,13	15,00	75,02	BB
37	PENGADILAN TINGGI AMBON	25,09	19,78	12,56	7,00	16,25	80,68	A
38	MAHKAMAH	19,07	15,68	9,47	6,38	11,88	62,48	B

	SYAR'YAH ACEH							
39	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	20,24	18,66	9,00	5,25	10,00	63,15	B
40	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	25,20	20,27	12,23	7,54	11,88	77,12	BB
41	PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL	22,85	20,04	11,58	6,58	13,33	74,38	BB
42	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	24,93	19,38	12,23	7,88	15,00	79,42	BB
43	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	22,76	19,64	12,94	7,67	11,88	74,89	BB
44	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	23,98	19,90	11,77	7,96	13,96	77,57	BB
45	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	22,68	20,16	12,23	8,08	15,00	78,15	BB
46	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	23,38	19,90	10,64	5,75	14,38	74,05	BB
47	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	23,75	19,38	12,23	7,67	15,00	78,03	BB
48	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	25,25	19,11	12,19	8,08	15,00	79,63	BB
49	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	20,03	17,35	10,41	6,25	10,63	64,67	B
50	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	24,07	18,63	12,19	7,46	15,00	77,35	BB
51	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	24,90	19,00	11,72	7,75	15,00	78,37	BB
52	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	25,09	17,80	12,23	8,63	16,67	80,42	A
53	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	23,79	19,38	11,67	7,00	15,63	77,47	BB
54	PENGADILAN TINGGI AGAMAGORONTALO	24,03	19,75	11,11	7,00	12,29	74,18	BB
55	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	20,35	16,95	11,67	7,75	15,00	71,72	BB
56	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	24,36	19,75	11,67	7,88	15,00	78,66	BB
57	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	22,06	18,63	11,58	7,00	10,00	69,27	B
58	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	21,35	17,89	12,00	7,75	11,25	70,24	BB
59	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	21,81	17,36	12,23	7,42	12,29	71,11	BB
60	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	23,23	19,64	11,67	7,00	13,33	74,87	BB
61	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	21,69	17,88	12,23	7,75	16,25	75,80	BB
62	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	23,94	19,52	12,42	6,83	17,71	80,42	A
63	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	19,89	19,00	10,88	7,21	12,29	69,27	B
64	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	25,61	20,16	13,36	7,13	16,25	82,51	A
65	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	26,15	20,42	12,56	7,33	17,29	83,75	A
66	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	24,20	19,52	9,89	7,33	15,00	75,94	BB
67	PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN	19,05	18,75	10,73	6,00	15,00	69,53	BB
68	PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA	22,38	17,09	9,47	6,58	10,00	65,52	B

69	PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA	20,78	13,89	11,16	5,50	8,96	60,29	B
70	PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR	22,85	19,38	12,23	7,00	10,63	72,09	BB
71	DELMILTAMA	23,69	18,63	11,67	6,25	15,00	75,24	BB
72	DELMILT I MEDAN	23,01	19,90	10,13	5,21	13,96	72,21	BB
73	DELMILT II JAKARTA	22,32	17,20	12,42	7,50	15,00	74,44	BB
74	DELMILT III SURABAYA	22,74	17,88	11,11	6,38	11,67	69,78	B
	JUMLAH	1696,61	1372,91	859,45	520,11	1000,88	5449,96	
	RATA-RATA	22,93	18,55	11,61	7,03	13,53	73,65	BB

8. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut pada 96 (sembilan puluh enam) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Monitoring pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 54 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 29 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 4 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 9 satker.

9. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97 (sembilan puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 59 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 27 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 6 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker.

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Hasil Temuan Bidang Pelayanan Publik, meliputi :
 - a) Kualitas Standar Pelayanan sejumlah 42 temuan
 - b) Kualitas Sistem Informasi Pelayanan sejumlah 26 temuan
 - c) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan sejumlah 26 temuan
 - d) Proses Penanganan Pengaduan sejumlah 21 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan temuan terkait kualitas standar pelayanan mencapai 42 (empat puluh dua) temuan (36,52%) dari 115 (seratus lima belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya kualitas standar pelayanan sesuai aturan yang berlaku.

2) Hasil Temuan Bidang PNBPN

- a) Pemungutan PNBPN jumlah 0 temuan
- b) Penyetoran PNBPN jumlah 4 temuan
- c) Penatausahaan PNBPN jumlah 5 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBPN menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan PNBPN lebih dominan yakni mencapai 5 (lima) temuan (55,56%) dari 9 (sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya penatausahaan PNBPN sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

3) Jenis Temuan Bidang Keuangan Perkara

- a) Panjar Biaya Perkara jumlah 76 temuan
- b) Penatausahaan Persediaan dari Biaya Proses jumlah 99 temuan
- c) Pengembalian Sisa Panjar jumlah 36 temuan
- d) Pengembalian Biaya Perkara tidak melalui Bank jumlah 6 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni mencapai 99 (sembilan puluh sembilan) temuan (45,62%) dari 217 (dua ratus tujuh belas) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

- a. Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- b. Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebesar Rp42.869.200.522,00. nilai rekomendasi sebesar Rp33.997.443.502,00. Hingga Semester II tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00. sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.800.266.156,00. atau sebesar 14,12% dan nilai sebesar Rp583.806.372,00 atau sebesar 1,72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas

negara sejak tahun 2005 sampai dengan Semester II tahun 2019 sebesar Rp32.588.694.000,00.

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester II tahun 2019.

11. Penguatan Sistem Pengawasan

a) Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan dengan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan serta Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh Pengadilan Tingkat Banding.

Adapun materi yang disampaikan dari Rapat Koordinasi sebagai berikut:

- 1) Manajemen Peradilan
- 2) Administrasi Perkara
- 3) Administrasi Persidangan
- 4) Administrasi Umum
- 5) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 6) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- 7) Gratifikasi.

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada 6 (enam) wilayah yaitu: Bali, Bangka Belitung, Makassar, Banten dan DKI Jakarta, Manado, dan Batam dengan total peserta sejumlah 386 orang.

b) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para Hakim, Panitera, Sekretaris, yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan Consulting, dengan materi diantaranya: Gratifikasi, LHKPN, Pemuliaan Peradilan, Penilaian Zona Integritas dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Consulting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan Implementasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2019

dengan peserta Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Jambi dengan jumlah peserta 63 orang.

c) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

Quality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan *output* yang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang diperlukan dan pelayanan yang diberikan. *QA* merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparatur peradilan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas temuan yang berkaitan dengan:

1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.
2. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku.
3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dari pelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan berbasis kas.

Data permasalahan yang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada.
2. Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2019 *Quality Assurance* dilaksanakan di Kupang tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2019 dengan peserta Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan Peradilan dengan jumlah peserta 96 (sembilan puluh enam) orang.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

1) Sekretariat Badan Pengawasan;

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I;

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III;

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas dan Fungsi
- c. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2019

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

IV. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan perencanaan keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah " Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa".

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi			
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler			1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
	Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas			
	Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa			
	Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan			
	Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan			
	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana			
	Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang			
	Jumlah pegawai yang mengikuti Assesment			
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting			
	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan			
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan			
Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan				

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM 2015–2019.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	jumlah pengaduan yang diterima dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

C. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2019 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2019 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Badan Pengawasan MA RI Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi, Pendidikan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (175 LHP)			-	170 (LHP)	Rp6.139.841.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang diinkukan pengawasan reguler	54 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wal I, II, III, IV	97 (LHP)	Rp2.524.564.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan	83 LHP				95 (LHP)	Rp3.334.436.000

	pemeriksaan kinerja dan integritas						
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP				12 (LHP)	Rp 133.681.000
	4. Jumlah Setoran Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP				21 (LHP)	Rp 363.726.000
	5. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	74 LHE			001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	3 (Kegiatan)	Rp 230.311.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung		2 (Kegiatan)	Rp 471.834.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang				1 (Kegiatan)	Rp 978.834.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assessment	25 Orang				20 (Orang)	Rp 244.105.000
	9. Jumlah Penguatan APIP Consulting	60 Orang				2 (Kegiatan)	Rp 244.827.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang				2 (Kegiatan)	Rp 643.671.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7 (LHP)	Rp 107.083.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4 (LHP)	Rp 21.071.000

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.139.841.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	54 LHP		Rp2.524.564.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 LHP		Rp3.334.436.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP		Rp 133.681.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP		Rp 363.726.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 230.311.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang		Rp 471.834.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang		Rp 978.834.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 244.105.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	60 Orang		Rp 244.827.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang		Rp 643.671.000
11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP	Rp 107.083.000		
12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP	Rp 21.071.000		

Jumlah Anggaran : Rp15.437.984.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 471.834.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang		Rp 978.834.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 244.105.000
	Jumlah Penguatan APJP / Consulting	60 Orang		Rp 244.827.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang		Rp 643.671.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 107.083.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 21.071.000

Jumlah Anggaran : Rp2.711.425.000,-

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

Tabel 2.4.3 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.666.704.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 644.665.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 901.486.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit	1 LHP		Rp 33.390.000

	barang dan jasa		
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 LHP	Rp 128.856.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHE	Rp 31.986.000

Jumlah Anggaran : Rp3.407.087.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

Tabel 2.4.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.825.285.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	14 LHP		Rp 441.345.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 928.866.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	1 LHP		Rp 28.019.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 96.923.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LHE		Rp 126.995.000

Jumlah Anggaran : Rp3.447.433.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

Tabel 2.4.5 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.400.472.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 874.627.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 916.287.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 37.008.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 64.595.000
	Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	19 LHE	Rp 31.968.000	

Jumlah Anggaran : Rp3.324.957.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

Tabel 2.4.6 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum,	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan	100%		Rp1.247.380.000

	dipublikasi (kasus)		Penanganan Pengaduan	
Terselenggaranya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	10 LHP		Rp 563.927.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	13 LHP		Rp 587.797.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 35.264.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 73.352.000
	Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	10 LHE		Rp 39.362.000

Jumlah Anggaran : Rp2.547.082.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

Perbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	46	78	36	21	181	148 LHP	122%
Reguler	49	52	32	19	152	89 LHP	171%
Audit PBJ	3	2	3	3	11	8 LHP	137%
Reviu RKAKL dan Reviu RKBMN	1	2	1	1	5	4 LHP	125%
Reviu LK	0	6	0	0	6	2 LHP	300%
Pemeriksaan Kinerja / Integritas	31	31	26	12	100	78 LHP	128%
Pemeriksaan Keuangan	4	2	2	2	10	10 LHP	100%
Evaluasi LKJIP	20	25	19	10	74	74 LHE	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4 LHP	100%
Monitoring	3	6	3	3	15	12 LHP	125%
TOTAL	158	205	123	72	558	429	141%

* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada Unit Eselon I Mahkamah Agung

Tabel 2.5.2 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Realisasi	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Kasus	54	85	40	26	205	175	117%
Reguler	15	14	19	10	58	54	107%
Pemeriksaan Kinerja / Zona Integritas	26	35	25	11	97	83	117%
Monitoring	30	31	13	22	96	57	168%
Pemeriksaan Keuangan	4	13	2	2	21	10	210%
Reviu LK	-	6	-	-	6	2	300%
Reviu / Verifikasi pernyataan telah di reviu	-	8	-	-	8	2	400%
Reviu Hibah	-	5	-	-	5	2	250%
Reviu Pengelolaan Anggaran	-	4	-	-	4	4	100%
Reviu Perencanaan Anggaran	-	3	-	-	3	3	100%
Reviu PNPB	-	3	-	-	3	3	100%
Reviu PIPK	-	4	-	-	4	4	100%
Evaluasi LKjIP	1	5	1	1	8	7	114%
Audit Manajemen Kepegawaian	1	1	1	1	4	4	100%
Audit PBJ	1	1	1	1	4	4	100%
SIDAK	26				37	40	92%
Mysteri Shopper	11						
TLHP BPK	21					10	210%
LO Pendampingan	17					4	425%
TOTAL							173%

Capaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2019 melebihi target yang direncanakan dari target 100% yaitu 173%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – tahun 2019.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%	100% (2.952 pengaduan)	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100% (175 LHP)	117% (205 LHP)	117%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	54 Satker	58 Satker	107%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 Satker	97 Satker	117%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 Satker	4 Satker	100%
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 Satker	21 Satker	210%

5.	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang	188 Orang	303%
6.	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang	32 Orang	128%
7.	Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	60 Orang	63 Orang	105%
8.	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang	196 Orang	126%
9.	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang	96 Orang	120%
10.	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP	20 LHP	200%
11.	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	10 LHP	2 LHP	20%
12.	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE	74 LHE	100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kerjanya, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, efektif dan efisien

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.	100% (3.080 pengaduan)	100% (3.080 pengaduan)	100%	100% (2.952 pengaduan)	100% (2.952 pengaduan)	100%

Pada Tahun 2019 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 2.952 pengaduan dengan capaian kinerja 100%, tindaklanjut atas surat tersebut diperinci sebagai berikut : diperiksa Tim Badan Pengawasan 290 pengaduan, dijawab dengan surat 785 pengaduan, dididagaskan ke pengadilan tk. Banding 52 pengaduan dan tk. Pertama 779 pengaduan, diteruskan ke Mahkamah Agung 35 pengaduan, masih dalam proses 996 pengaduan dan diarsip 15 pengaduan.

Perbandingan pengaduan yang masuk dalam 5 (lima) tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 2.366 pengaduan dengan tahun 2015 sejumlah 1.408 pengaduan, mengalami kenaikan sejumlah 928 pengaduan.
2. Tahun 2017 sejumlah 2.642 pengaduan dengan tahun 2016 sejumlah 2.366 pengaduan, mengalami kenaikan 276 pengaduan.
3. Tahun 2018 sejumlah 3.080 pengaduan dengan tahun 2017 sejumlah 2.642 pengaduan, mengalami kenaikan 438 pengaduan.
4. Tahun 2019 sejumlah 2.952 pengaduan dengan tahun 2018 sejumlah 3.080 pengaduan, mengalami penurunan 128 pengaduan.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 secara umum dalam 4 (empat) tahun terdapat kenaikan pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan dikarenakan adanya aplikasi SIWAS yang memberikan kemudahan masyarakat dalam penyampaian pengaduan dimanapun, kecuali pada tahun 2019 saja terjadi penurunan hal ini terjadi karena kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang cepat dan penjatuhian sanksi yang tegas, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan sudah berupa *outcome*.

Indikator kinerja ke-2 : Prosentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Prosentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100% (148 LHP)	122% (181 LHP)	122%	100% (175 LHP)	117% (205 LHP)	117%

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 205 laporan, melampaui target yang telah ditetapkan sejumlah 175 LHP dengan capaian kinerja 117%

Perbandingan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dalam 5 (lima) tahun Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 247 LHP dengan tahun 2015 sejumlah 202 LHP, mengalami kenaikan sebesar 45 LHP.
2. Tahun 2017 sejumlah 228 LHP dengan tahun 2016 sejumlah 247 LHP, mengalami penurunan sejumlah 19 LHP.
3. Tahun 2018 sejumlah 181 LHP dengan tahun 2017 sejumlah 228 LHP, mengalami penurunan sejumlah 47 LHP.
4. Tahun 2019 sejumlah 205 LHP dengan tahun 2018 sejumlah 181 LHP, mengalami kenaikan sejumlah 24 LHP.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019 terdapat kenaikan pada tahun 2016 dan tahun 2019 dan penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2017 dari LHP pengaduan yang ditindaklanjuti, akan tetapi bukan berarti kinerja dari Badan Pengawasan tidak stabil karena jika dilihat dari target yang ditetapkan setiap tahunnya selalu realisasi dari pengaduan yang ditindaklanjuti melebihi dari target yang telah ditetapkan, walaupun disisi lain masih terdapat pengaduan yang ditindaklanjuti penanganannya agak lama tetapi hal tersebut bukan berkenaan dengan kinerja dari Badan Pengawasan tetapi lebih kepada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan sudah berupa *output penting*.

Aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 205 LHP, dari 205 LHP yang ditindaklanjuti sejumlah 86 LHP tidak terbukti atau hanya diberikan peringatan saja sedangkan sejumlah 119 LHP terbukti dan dikenakan hukuman disiplin. Dari 119 LHP tersebut aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin sejumlah 179 orang seperti tabel berikut :

Tabel 3.2 Hukuman Disiplin Tahun 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	26	13	46	85
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	3	3	11	17
3.	Sekretaris	-	-	2	2
4.	Panitera Muda	6	3	5	14
5.	Panitera Pengganti	9	5	6	20
6.	Jurusita	2	-	1	3
7.	Jurusita Pengganti	2	-	4	6
8.	Pejabat Struktural	6	-	3	9
9.	Staf	13	3	3	19
10.	Calon Hakim	2	1	-	3
Jumlah		69	29	81	179

SASARAN 2 : Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja ke-1 : Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler	100% (89 Satker)	171% (152 Satker)	171%	100% (54 Satker)	107% (58 Satker)	107%

Pada Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan reguler terhadap 58 satker melampaui dari target yang telah ditetapkan sejumlah 54 satker.

Perbandingan *pengawasan reguler* dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 169 satker dan tahun 2015 sejumlah 99 satker mengalami kenaikan sejumlah 70 satker
2. Tahun 2017 sejumlah 125 satker dan tahun 2016 sejumlah 169 satker mengalami penurunan sejumlah 44 satker
3. Tahun 2018 sejumlah 152 satker, tahun 2017 sejumlah 125 satker mengalami kenaikan sejumlah 27 satker
4. Tahun 2019 sejumlah 58 satker dan tahun 2018 sejumlah 152 satker mengalami penurunan sejumlah 94 satker, hal ini dikarenakan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan reguler yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2018 terdapat kenaikan yang tidak begitu besar dari satker yang dilakukan pemeriksaan reguler, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output* dikarenakan berdasarkan pada jumlah satker yang telah dilakukan pemeriksaan reguler, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada, berapa persen dari satker yang telah dilakukan pemeriksaan reguler sudah tertib administrasi peradilan yang baik dan benar, kualitas standard pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, penanganan pengaduan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator kinerja ke-2 : Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas	100% (78 Satker)	128% (100 Satker)	128%	100% (83 Satker)	117% (97 Satker)	117%

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas dimaksudkan untuk mengukur Penyelenggaraan manajemen peradilan, diantaranya pada bidang Pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, kualitas standard pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, penanganan pengaduan, administrasi dan finansial serta untuk menjamin tertib administrasi peradilan yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para pencari keadilan.

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja/integritas pada 97 Satker dimana melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 83 satker dengan capaian kinerja 117%.

Perbandingan Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 101 satker dan tahun 2015 sejumlah 107 satker mengalami penurunan sejumlah 6 satker.
2. Tahun 2017 sejumlah 102 satker dan tahun 2016 sejumlah 101 satker, mengalami kenaikan sejumlah 1 satker.
3. Tahun 2018 sejumlah 100 satker dan tahun 2017 sejumlah 102 satker, mengalami penurunan sejumlah 2 satker.
4. Tahun 2019 sejumlah 97 satker dan tahun 2018 sejumlah 100 satker, mengalami penurunan sejumlah 3 satker.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan/kenaikan yang tidak begitu besar dari satker yang dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output* dikarenakan berdasarkan pada jumlah satker yang telah dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari satker yang telah dilakukan pemeriksaan kinerja/integritas sudah tertib administrasi peradilan yang baik dan benar, kualitas standard pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, penanganan pengaduan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Indikator kinerja ke-3 : Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa

No	Indikator Kinerja	Targe	Realisasi	Capaian	Targe	Realisasi	Capaian
		l		n			
		2018			2019		
1	Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan audit barang dan jasa	100% (8 Satker)	137% (11 Satker)	137%	100% (4 Satker)	100% (4 Satker)	100%

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan Pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa pada 4 satker mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 4 satker, dengan capaian kinerja 100%.

Perbandingan pengadilan yang sudah di audit pengadaan barang dan jasa dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 12 satker dan tahun 2015 sejumlah 12 satker, tidak terdapat kenaikan/penurunan jumlah satker.
2. Tahun 2017 sejumlah 14 satker dan tahun 2016 sejumlah 12 satker, mengalami kenaikan sejumlah 2 satker.
3. Tahun 2018 sejumlah 11 satker dan tahun 2017 sejumlah 14 satker mengalami penurunan sejumlah 3 satker dan
4. Tahun 2019 sejumlah 4 satker dan tahun 2018 sejumlah 11 satker, mengalami penurunan sejumlah 7 satker.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan/kenaikan kenaikan yang tidak begitu besar dari satker yang dilakukan audit barang dan jasa, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output* dikarenakan berdasarkan pada jumlah satker yang telah dilakukan audit barang dan jasa, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari satker yang telah dilakukan audit barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam pengelolaan barang dan jasa.

Indikator kinerja ke-4: Jumlah pemeriksaan keuangan yang dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah pemeriksaan keuangan yang dilakukan	100% (10 Satker)	100% (10 Satker)	100%	100% (10 Satker)	210% (21 Satker)	210%

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Keuangan pada 21 satker, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 10 satker, dengan capaian kinerja 210%.

Perbandingan pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan keuangan dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2017 sejumlah 24 satker dengan tahun 2016 sejumlah 31 satker mengalami penurunan sejumlah 7 satker, dan
2. Tahun 2018 sejumlah 10 satker dengan tahun 2017 sejumlah 24 satker mengalami penurunan sejumlah 14 satker .
3. Tahun 2019 sejumlah 21 satker dengan tahun 2018 sejumlah 10 satker, mengalami kenaikan sejumlah 11 satker.

Dari perbandingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan/kenaikan yang tidak begitu besar dari jumlah satker yang dilakukan pemeriksaan keuangan, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output*

dikarenakan berdasarkan pada jumlah satker yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari satker yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan apabila dilakukan pemeriksaan oleh BPK potensi temuannya sangat kecil.

Indikator kinerja ke-5: Jumlah penguatan hakim pengawas bidang

No	Indikator Kinerja	Targe	Realisasi	Capaian	Targer	Realisasi	Capaian
		t	2018	n	2019		
1	Jumlah penguatan hakim pengawas bidang	100% (130 Orang)	154% (201 Orang)	154%	100% (62 Orang)	303% (188 Orang)	303%

Untuk meningkatkan kapasitas Hakim Pengawas Bidang, Badan Pengawasan perlu mengawal dan memberikan pembekalan agar Hakim Pengawas Bidang dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan.

Pada tahun 2019 kegiatan rakor penguatan hakim pengawas bidang telah dilaksanakan dengan peserta sejumlah 188 orang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 62 orang, dengan capaian kinerja 303%.

Perbandingan Jumlah rakor penguatan hakim pengawas bidang dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 143 orang dengan tahun 2015 sejumlah 489 orang mengalami penurunan sejumlah 346 orang,
2. Tahun 2017 sejumlah 80 orang dengan tahun 2016 sejumlah 143 orang mengalami penurunan sejumlah 63 orang, dan
3. Tahun 2019 sejumlah 188 orang dengan tahun 2018 sejumlah 201 orang, mengalami penurunan sejumlah 13 orang,
4. Tahun 2018 sejumlah 201 orang dengan tahun 2017 sejumlah 80 orang, mengalami kenaikan sejumlah 121 orang.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2016 dan kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 serta penurunan pada tahun-tahun lainnya yang tidak begitu besar pada peserta rakor penguatan hakim pengawas bidang, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa output ini dikarenakan berdasarkan pada jumlah peserta yang mengikuti rakor penguatan hakim pengawas bidang, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari peserta rakor penguatan hakim pengawas bidang dapat mengimplementasikan setelah kembali ke satkernya serta dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan.

Indikator kinerja ke-6: Jumlah assesment yang telah dilakukan

No	Indikator Kinerja	Targe	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah assesment yang telah dilakukan	100% (27 Orang)	100% (27 Orang)	100%	100% (25 Orang)	128% (32 Orang)	128%

Assesment adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Pengertian *Kompetensi* adalah seperangkat pengetahuan keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dan diaktualisasikan dalam kehidupan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan 2 kegiatan assesment atau setara dengan 100% yang diikuti oleh 32 orang peserta, pelaksanaan assesment ini melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 2 kegiatan dengan 25 orang peserta dengan capaian 128%.

Perbandingan Jumlah *Assesment* dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 20 orang dengan tahun 2015 sejumlah 30 orang mengalami penurunan sejumlah 10 orang.
2. Tahun 2017 sejumlah 21 orang dengan tahun 2016 sejumlah 20 orang mengalami kenaikan sejumlah 1 orang.
3. Tahun 2018 sejumlah 27 orang dengan tahun 2017 sejumlah 21 orang, mengalami kenaikan sejumlah 6 orang dan
4. Tahun 2019 sejumlah 32 orang dengan tahun 2018 sejumlah 27 orang, mengalami kenaikan sejumlah 5 orang.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan/kenaikan yang tidak begitu besar dari peserta yang mengikuti *Assesment*, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output* ini dikarenakan berdasarkan pada jumlah peserta yang mengikuti assesment, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari peserta yang mengikuti assesment yang kompetensi dibidangnya.

Indikator kinerja ke-7: Jumlah penguatan APIP/Consulting

No	Indikator Kinerja	Targe	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah penguatan APIP/Consulting	100% (130 Orang)	147% (191 Orang)	147%	100% (60 Orang)	105% (63 (orang)	105%

Consulting adalah ketika Anda meminta bantuan seorang ahli (konsultan) untuk memecahkan masalah yang dihadapi, di sini kata kuncinya adalah pemecahan masalah (problem solving).

Pada tahun 2019 kegiatan rakor penguatan APIP / Consulting telah dilaksanakan dengan peserta sejumlah 63 orang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 60 orang, dengan capaian kinerja 105%.

Perbandingan Jumlah rakor penguatan APIP / Consulting dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2017 sejumlah 340 orang dengan tahun 2016 sejumlah 321 orang, mengalami kenaikan 19 orang.
2. Tahun 2018 sejumlah 191 orang dengan tahun 2017 sejumlah 340 orang mengalami penurunan sejumlah 149 orang.
3. Tahun 2019 sejumlah 63 orang dengan tahun 2018 sejumlah 191 orang, mengalami penurunan sejumlah 128 orang.

Dari perbandingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan di tahun 2018 dan 2019 yang signifikan dan pada tahun-tahun sebelumnya terjadi kenaikan yang kecil dalam jumlah peserta, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa output ini dikarenakan berdasarkan pada jumlah peserta yang mengikuti rakor penguatan APIP / Consulting, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari peserta yang mengikuti rakor penguatan APIP / Consulting tersebut terselesaikan permasalahannya.

Indikator kinerja ke-8: Jumlah pembinaan sistem pengaduan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah pembinaan sistem pengaduan	100% (145 Orang)	108% (157 Orang)	108%	100% (155 Orang)	126% (196 Orang)	126%

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan adalah untuk mengetahui kemampuan dan peningkatan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur peradilan dalam menangani pengaduan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan 2 kegiatan pelaksanaan pembinaan sistem pengaduan dengan target 155 orang peserta atau setara dengan 100% dan realisasi sebanyak 196 orang peserta atau 126%, melampaui target yang sesuai dengan perencanaan yaitu 155 orang peserta. Hal ini dikarenakan ada ketersediaan anggaran yang mencukupi dan adanya permintaan dari masing-masing satker yang ada.

Perbandingan Jumlah rakor Pembinaan Sistem Pengaduan dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2017 sejumlah 184 orang dengan tahun 2016 sejumlah 336 orang, mengalami penurunan sejumlah 152 orang, dan
2. Tahun 2018 sejumlah 157 orang dengan tahun 2017 sejumlah 184 orang mengalami penurunan sejumlah 27 orang
3. Tahun 2019 sejumlah 196 orang dengan tahun 2018 sejumlah 157 orang, mengalami kenaikan sejumlah 39 orang.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2017 dan kenaikan serta penurunan yang tidak begitu besar, dalam hal ini kinerja Badan Pengawasan baru berupa *output* ini dikarenakan berdasarkan pada jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sistem pengaduan, sedangkan kinerja yang sebenarnya dari Badan Pengawasan dinilai berdasarkan pada berapa persen dari peserta yang mengikuti pembinaan tersebut setelah kembali ke sarkernya dapat melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Indikator kinerja ke-9 : Jumlah kegiatan Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah rakor quality assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	100% (2 Kegiatan/ 130 Orang)	181% (236 Orang)	181%	100% (1 Kegiatan/ 80 Orang)	120% (1 kegiatan/ 96 orang)	120%

Quality Assurance adalah kegiatan yang memastikan sistematis pekerjaan diimplementasikan dalam sistem mutu sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan peradilan. Pada tahun 2019 kegiatan *Quality Assurance* (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan pada 1 lokasi (96 orang) melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 1 lokasi (80 orang), dengan capaian kinerja 120%.

Perbandingan Jumlah rakor quality assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 2 lokasi dan tahun 2015 sejumlah 4 lokasi, mengalami kenaikan sejumlah 2 lokasi.
2. Tahun 2017 sejumlah 2 lokasi dan tahun 2016 sejumlah 2 lokasi tidak ada kenaikan/penurunan,

3. Tahun 2018 sejumlah 2 lokasi dan tahun 2017 sejumlah 2 lokasi, tidak ada kenaikan/penurunan.
4. Tahun 2019 sejumlah 1 lokasi dan tahun 2018 sejumlah 2 lokasi, mengalami penurunan 1 lokasi.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, *terdapat penurunan/kenaikan yang stabil hal ini berkaitan dengan penerapan dari manajemen risiko dalam perencanaan satker yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan Quality Assurance sehingga hasilnya tepat sasaran, dalam hal ini capain kinerja Badan Pengawasan berupa output penting karena kinerja yang dilihat bukan dari penetapan jumlah satker atau peserta yang ikut kegiatan Quality Assurance tetapi dilihat dari hasil dari kegiatan Quality Assurance tersebut.*

Indikator kinerja ke-10 : Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana	100% (10 LHP)	100% (10 LHP)	100%	100% (10 LHP)	200% (20 LHP)	200%

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah/lembaga adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah/lembaga menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dengan target 10 LHP atau setara dengan 100% dan realisasi yang dilaksanakan sebanyak 20 LHP atau 200%, hal ini melampaui program dan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Perbandingan Jumlah *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana* dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2017 sejumlah 7 LHP dengan tahun 2016 sejumlah 40 LHP, mengalami penurunan sejumlah 33 LHP.
2. Tahun 2018 sejumlah 10 LHP dengan tahun 2017 sejumlah 7 LHP, mengalami kenaikan sejumlah 3 LHP.
3. Tahun 2019 sejumlah 20 LHP dengan tahun 2018 sejumlah 10 LHP, mengalami kenaikan sejumlah 10 LHP.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, *terdapat penurunan yang paling signifikan pada tahun 2017 dan kenaikan yang besar pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan, hal ini tentunya menjadi perhatian untuk*

penetapan target pada tahun yang akan datang sehingga antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya tidak begitu terpaut besar, tetapi ini tidak berpengaruh kepada kinerja dari Badan Pengawasan dengan capaian kinerja output penting, hal ini didasarkan kepada cepatnya temuan yang diperbaiki serta hasil dari perbaikan tersebut dapat diterima oleh BPK.

Indikator kinerja ke-11 : Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2018			2019		
1	Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100% (2 LHP)	100% (2 LHP)	100%	100% (10 LHP)	20% (2 LHP)	20%

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2019 Badan Pengawasan merencanakan untuk melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim yaitu 10 kegiatan MKH namun target dan realisasi hanya 2 kegiatan MKH atau 2 LHP, dengan perjatuhan hukuman kepada Hakim yang bersangkutan berupa hukuman disiplin masing-masing pemberhentian dengan hormat.

Perbandingan Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 sejumlah 3 kegiatan dengan tahun 2015 sejumlah 6 kegiatan, mengalami penurunan sejumlah 3 kegiatan
2. Tahun 2017 sejumlah 2 kegiatan dengan tahun 2016 sejumlah 3 kegiatan, mengalami penurunan 1 kegiatan.
3. Tahun 2018 sejumlah 2 kegiatan dengan tahun 2017 sejumlah 2 kegiatan, tidak ada kenaikan/penurunan.
4. Tahun 2019 sejumlah 2 kegiatan dengan tahun 2018 sejumlah 2 kegiatan, tidak ada kenaikan/penurunan.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2016 dan kenaikan serta penurunan yang tidak begitu besar atau stabil pada tahun-tahun berikutnya, walaupun antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan terpaut jauh (dan ini sebagai koreksi untuk penetapan target tahun berikutnya), hal ini tidak berpengaruh kepada kinerja dari Badan Pengawasan dikarenakan apa yang dilanggar dengan sanksi yang dijatuhkan sudah dirasakan sesuai dengan rasa keadilan dan diterima oleh para pelanggar, dengan demikian kinerja dari Badan Pengawasan sudah berupa outcome. Dimana Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim terjadi.

karena jumlah pelanggaran hakim yang memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang majelis kehormatan hakim.

Indikator kinerja ke-12 : Jumlah LKjIP yang selesai dilakukan evaluasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2015			2016		
1	Jumlah LKjIP yang selesai di evaluasi	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%

Pada tahun 2019 dari 74 Satuan Kerja (satker) eselon I pusat dan empat lingkungan peradilan yang dilakukan evaluasi, yang mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 52 satker, penilaian B adalah 14 satker dan penilaian CC adalah 1 satker dan penilaian C adalah 0 satker.

Perbandingan nilai LKjIP yang di evaluasi dalam lima tahun masa Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2016 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,45 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B adalah 22 satker dan penilaian CC adalah 3 satker dan penilaian C adalah 1 satker, dan tahun 2015 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,08 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 8 Satker, penilaian BB adalah 35 satker, penilaian B adalah 23 satker dan penilaian CC adalah 6 satker, penilaian C adalah 1 satker dan penilaian D adalah 1 satker mengalami kenaikan nilai rata-rata sebanyak 0,37.
2. Tahun 2017 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,13 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 1 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B adalah 30 satker dan penilaian CC adalah 1 satker dan penilaian C adalah 1 satker, dan tahun 2016 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,45 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B adalah 22 satker dan penilaian CC adalah 3 satker dan penilaian C adalah 1 satker mengalami penurunan nilai rata-rata sebanyak 0,32.
3. Tahun 2018 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 71,53 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 3 Satker, penilaian BB adalah 49 satker, penilaian B adalah 12 satker dan penilaian CC adalah 10 satker dan penilaian C adalah 0 satker, dan tahun 2017 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 70,13 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 1 Satker, penilaian BB adalah 41 satker, penilaian B adalah 30 satker dan penilaian CC adalah 1 satker dan penilaian C adalah 1 satker mengalami kenaikan nilai rata-rata sebanyak 1,4.

4. Tahun 2019 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 73,65 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 7 Satker, penilaian BB adalah 52 satker, penilaian B adalah 14 satker dan penilaian CC adalah 1 satker dan penilaian C adalah 0 satker, dan tahun 2018 rata-rata nilai SAKIP Eselon I dan tingkat banding sebesar 71,53 (BB) dengan rincian yang mendapat penilaian A adalah 3 Satker, penilaian BB adalah 49 satker, penilaian B adalah 12 satker dan penilaian CC adalah 10 satker dan penilaian C adalah 0 satker mengalami kenaikan nilai rata-rata sebanyak 2,12.

Dari perbandingan 5 (lima) tahun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015 – 2019, terdapat kenaikan nilai LKJIP yang di evaluasi oleh Badan Pengawasan hal ini terjadi karena rekomendasi dari Badan Pengawasan ditindaklanjuti oleh satker yang bersangkutan dimana berdampak kepada perbaikan dalam SAKIP maupun dalam pengenalisaan kinerja LKJIP nya, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan sudah berupa outcome karena hasil dari evaluasi Badan Pengawasan sudah dirasakan langsung oleh satker berupa kenaikan nilai dari SAKIP nya.

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

Dari pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp33.650.414.000 telah direalisasi sebesar Rp33.594.292.582 atau 99,83%. Rincian realisasi anggaran kegiatan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Realisasi anggaran kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	-	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Rp6.139.841.000	Rp6.139.494.258	99,99%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	Rp3.524.564.000	Rp2.524.562.772	99,99%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	Rp3.334.436.000	Rp3.334.432.344	99,99%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	Rp 133.681.000	Rp 132.786.600	99,33%
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	Rp 363.726,000	Rp 363.724.047	99,99%
	5. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	Rp 978.834.000	Rp 978.834.000	100%

5. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	Rp 244.105.000	Rp 244.104.926	99,99%
7. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	Rp 244.827.000	Rp 244.826.100	99,99%
8. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	Rp 643.671.000	Rp 643.670.356	99,99%
9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	Rp 471.834.000	Rp 471.779.603	99,98%
10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	Rp 107.083.000	Rp 107.082.500	99,99%
11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	Rp 21.071.000	Rp 21.070.500	99,99%
12. Jumlah Evaluasi LKJP yang selesai dilakukan	Rp 230.311.000	Rp 230.309.712	99,99%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 132%, maka realisasi anggaran sebesar 93% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2 Efisiensi Anggaran Kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	% EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	-	100%	100%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	99,99%	117%	17%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	99,99%	107%	7%
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	00,00%	117%	17%
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	99,33%	100%	1%
	4. Jumlah Satun Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	99,99%	210%	110%
	5. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	100%	303%	203%
	6. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	99,99%	128%	28%
	7. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting	99,99%	105%	5%

	8. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	99,99%	126%	26%
	9. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	99,98%	120%	20%
	10. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	99,99%	200%	100%
	11. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	99,99%	20%	-80%
	12. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	99,99%	100%	0%
	JUMLAH	1299,21%	1853%	554%
	RATA-RATA	93%	132%	40%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra Tahun 2015 – Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2019 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai 99,83%, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan tahun 2019 dapat disimpulkan baik.

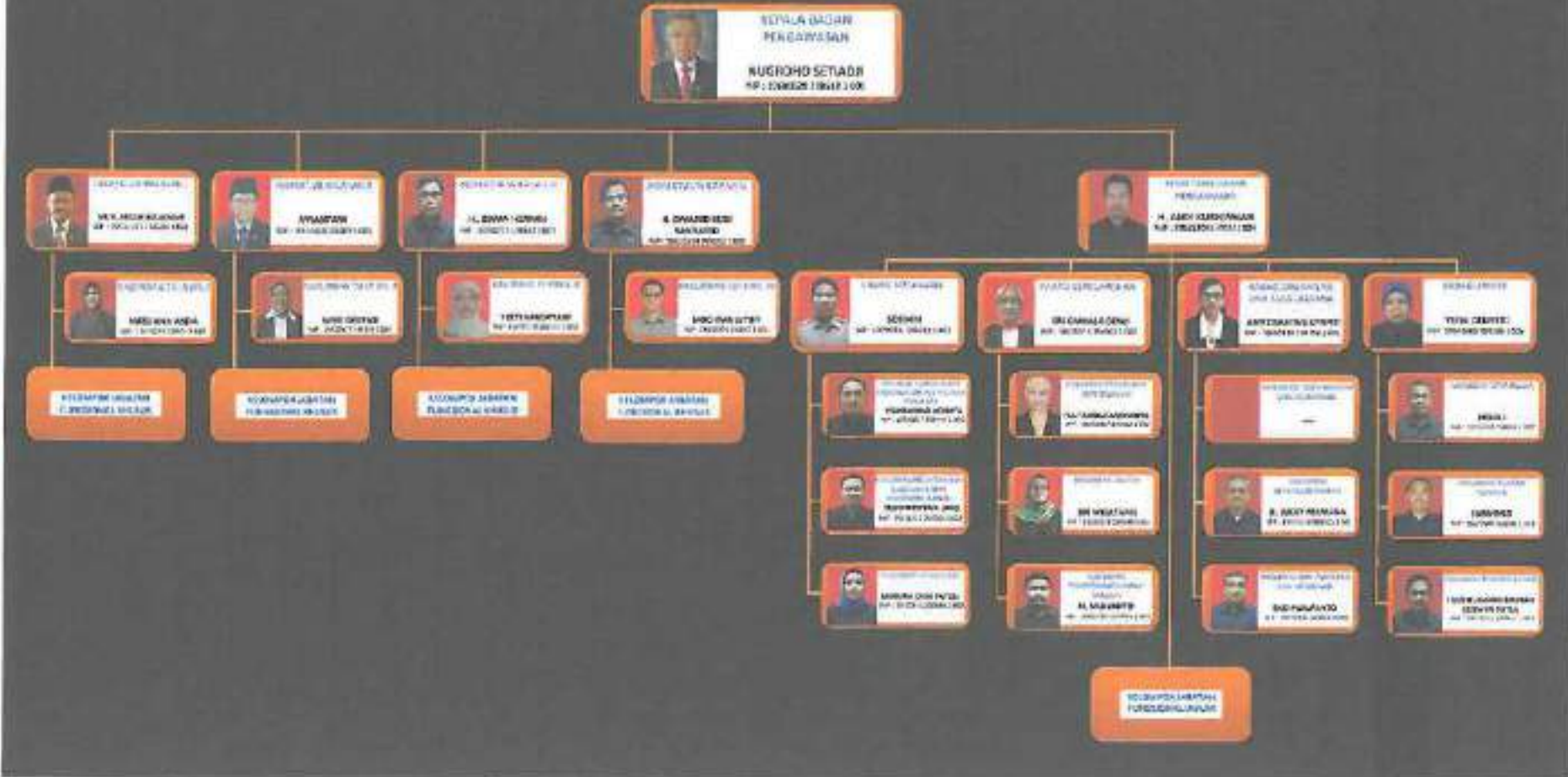
B. Saran

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR :50A / BP/SK/VIII/2016
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2015 – 2019 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/MPAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 5 Agustus 2016

Kepala Badan Pengawasan



NUGROHO SETIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : SoA /BP/SK/VIII/2016
 TANGGAL : 9 Agustus 2016

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang diterima dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Triwulan website dari Ortala

As
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI

Nugroho Setiadi
 NUGROHO SETIADI

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

REVIEW BASELINE 2014
BADAN PENGELOMPOKAN MAHKAMAH AGUNG RI

Date	Program/Kegiatan/Unit Kerja/Instansi	Isu	Indikator	VOLUME					APRIL 2014			PROJEKSI 2014			
				2014	2015	2016	2017	Sasaran	Operasional	Nov Dpt	Jumlah	2015	2016	2017	2018
4	Program Pengawasan dan Penyelidikan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah								4.881,2	21.240,9	28.850,0	38.872,0	38.122,0	41.266,1	43.701,0
1075	Pengawasan Pelaksanaan Isu, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Pengawasan Pengadilan Tingkat Wilayah 1	Pengawasan pengelolan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di tingkat wilayah 1	Jumlah penanganan pengawasannya, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tingkat Wilayah 1	64	101	119	122	Laporan	0,0	14.275,1	14.275,1	3.899,8	4.393,9	4.789,4	5.148,3
	Pemeriksaan Dasar	Pengawasan pengelolan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasannya, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya	14	44	46	47	Laporan	0,0	1.596,8	1.596,8	1.026,2	1.214,4	1.321,0	1.413,1
	Pemeriksaan Reguler	Terdapatnya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasannya, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya	28	24	31	33	Laporan	0,0	1.170,3	1.170,3	1.906,7	2.215,5	1.458,4	1.696,7
	Unit Pengaduan Masyarakat	Terdapatnya unit pengaduan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah unit pengaduan barang dan jasa wilayah 1		3	6	7	Laporan				128,0	141,6	160,1	179,1
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	29	30	34	37	Laporan	1.096,0	1.096,0	1.141,1	1.141,1	1.206,6	1.292,7	
1076	Pengawasan Pelaksanaan Isu, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Pengawasan Pengadilan Tingkat Wilayah 2	Pengawasan pengelolan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di tingkat Wilayah 2	Jumlah penanganan pengawasannya, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tingkat Wilayah 2	136	124	142	144	Laporan				3.062,1	4.426,7	4.618,1	4.766,7
	Pemeriksaan Dasar	Pengawasan pengelolan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penanganan pengawasannya, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya	49	44	70	70	Laporan	1.428,0	1.428,0	1.765,7	2.029,1	2.331,1	2.506,1	
	Pemeriksaan Reguler	Terdapatnya manajemen administrasi peradilan dan administrasi umum	Jumlah penanganan pengawasannya, administrasi peradilan, administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya	35	29	36	27	Laporan	1.096,4	1.096,4	241,7	326,8	1.026,6	1.122,3	
	Unit Pengaduan Masyarakat	Terdapatnya unit pengaduan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah unit pengaduan barang dan jasa wilayah 2		1	8	9	Laporan				26,1	115,4	140,1	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	34	35	70	48	Laporan	891,7	891,7	1.070,8	1.096,0	1.120,1	1.241,4	

5251	Pengawasan Pelaksanaan Televisi, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Pengawasan Pengadaan Inspektur Wilayah 3	Penerapan pengujian masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 3	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 3	81	93	112	115	Laporan			4.093,4	4.330,1	4.703,4	4.187,7
	Pemeriksaan Keuangan	Penerapan pengujian masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	18	42	40	40	Laporan	1.520,1	1.325,2	1.895,8	1.681,7	1.280,4	1.778,7
	Pemeriksaan Anggaran	Terselenggaranya manajemen administrasi pengadilan dan administrasi umum	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	18	28	34	33	Laporan	1.217,7	1.217,2	994,7	1.706,4	1.896,7	2.093,2
	Audit Pengawasan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 3		4	4	7	Laporan	-	-	148,7	145,4	148,7	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja badan dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemberlaksanaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	33	37	32	33	Laporan	480,4	462,5	1.170,4	462,4	741,1	602,5
5252	Pengawasan Pelaksanaan Televisi, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Pengawasan Pengadaan Inspektur Wilayah 4	Penerapan pengujian masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Inspektur Wilayah 4	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Inspektur Wilayah 4	42	46	55	58	Laporan			2.417,2	2.677,2	3.295,7	2.735,4
	Pemeriksaan Keuangan	Penerapan pengujian masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	18	18	20	20	Laporan	940,7	951,7	816,2	1.178,7	1.292,7	1.421,4
	Pemeriksaan Anggaran	Terselenggaranya manajemen administrasi pengadilan dan administrasi umum	Jumlah pengawasan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pengawasan pengadilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.	12	19	18	14	Laporan	711,7	725,7	1.180,7	692,2	686,4	871,4
	Audit Pengawasan Barang dan Jasa	Terlaksananya audit pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah audit pengadaan barang dan jasa wilayah 4		3	4	5	Laporan	-	-	286,0	143,4	146,2	176,2
	Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemberlaksanaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	12	8	10	18	Laporan	801,4	867,4	427,2	933,7	1.041,8	1.153,4

**SK TIM PENYUSUNAN LKjIP
BADAN PENGAWASAN TAHUN 2019**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : **91** /BP/SK/TX/2019

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa guna penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;

AS

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang berkaitan dengan Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2019 dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 2019.


**KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**


NUGROHO SETIADI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 Nomor : 91 /BP/SK/LX/2019
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)
 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nugroho Setiadji, S.H.	Kepala Badan Pengawasan	Penanggung Jawab
2.	Dr.Drs. H. Muh Abdul Sulaiman, S.H., M.H	Inspektur Wilayah I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Aviantara, S.H., M.Hum	Inspektur Wilayah II	Wakil Penanggung Jawab
4.	H. Iswan Herwin, S.H., M.H	Pit. Inspektur Wilayah III	Wakil Penanggung Jawab
5.	H. Dwianso Budi Santiaro, S.H., M.Hum	Inspektur Wilayah IV	Wakil Penanggung Jawab
6.	Drs. H. Andi Kurniaswan, M.M	Sekretaris Badan Pengawasan	Ketua
7.	Dra. Any Dyah Wijayanti	Kabag Organisasi dan Tataaksana	Sekretaris
8.	R. Lucky Permana, S.H., M.H.	Kasubbag Ketatalaksanaan	Anggota
9.	Eko Purwanto, S.T., M.H	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota
10.	Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E, Ak., C.A., MAk	Auditor	Anggota
11.	Irum Purnomo, S.E, Ak., C.A	Auditor	Anggota
12.	Muhammad Anis, S.E, Ak., C.A., MAk	Auditor	Anggota
13.	Rama Rahim, S.E., M.M., MBA	Auditor	Anggota
14.	Hendra Basry, S.H., M.Ak	Auditor	Anggota
15.	Zulfhan Sugiantoro, S.I	Pranata Komputer	Anggota
16.	Muhammad Huzairah, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
17.	Dewi Putri Novindari, S.Kom	Pelaksana/ Staf Bagian Orjala	Anggota

Jakarta, 30 September 2019
 KEPALA BADAN PENGAWASAN
 MAHKAMAH AGUNG RI


 NUGROHO SETIADJI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
2018**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (148 LHP)			-	170	Rp5.357.366.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	89 Satker			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97	Rp5.489.944.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	78 Satker				95	Rp3.456.482.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	8 Satker				12	Rp 338.629.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan	10 Satker				21	Rp 363.361.000

	pemeriksaan keuangan						
	5. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	74 LHE				3	Rp 140.983.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	130 orang		1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	001 Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan	2	Rp 839.131.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	130 orang				1	Rp 783.193.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	27 orang				20	Rp 157.700.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	130 orang				2	Rp 650.565.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	145 orang				2	Rp 747.660.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7	Rp 242.403.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	2 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4	Rp 25.940.000

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
2019**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
(RKT)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078,5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100% (175 LHP)			-	170 (LHP)	Rp6.139.841.000
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	54 LHP			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	97 (LHP)	Rp2.524.564.000
	2. Jumlah pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 LHP				95 (LHP)	Rp3.334.436.000
	3. Jumlah pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP				12 (LHP)	Rp 133.681.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP				21 (LHP)	Rp 363.726.000
	5. Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	74 LHE			001 Tenaga pengawas yang mendapat	3 (Kegiatan)	Rp 230.311.000
	6. Jumlah Quality Assurance	80 Orang			1079	2 (Kegiatan)	Rp 471.834.000

	pengelolaan keuangan yang terlaksana			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	peningkatan kompetensi sistem pengawasan		
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang				1 (Kegiatan)	Rp 978.834.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang				20 (Orang)	Rp 244.105.000
	9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting	60 Orang				2 (Kegiatan)	Rp 244.827.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang				2 (Kegiatan)	Rp 643.671.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP			002 Dokumen tata kelola	7 (LHP)	Rp 107.083.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP			004 Pelaksanaan MKH	4 (LHP)	Rp 21.071.000

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H.,M.Hum
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

Nugroho Setiadji, S.H.

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (Kasus)	100%		Rp6.139.841.000
Terselenggaranya manajemen persdilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	54 LHP	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	Rp2.524.564.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	83 LHP		Rp3.334.436.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	4 LHP		Rp 133.681.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	10 LHP		Rp 363.726.000
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	74 LHE		Rp 230.311.000
	6. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 471.834.000
	7. Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang		Rp 978.834.000
	8. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 244.105.000
	9. Jumlah Penguatan APiP / Consulting	60 Orang		Rp 244.827.000
	10. Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang		Rp 643.671.000
	11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 107.083.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 21.071.000

Jumlah Anggaran : Rp15.437.984.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Widanarko
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setladji
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua



Nugroho Setladji

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama



Erwin Widanarko

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 471.834.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang		Rp 978.834.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 244.105.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	60 Orang		Rp 244.827.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang		Rp 643.671.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 107.083.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 21.071.000

Jumlah Anggaran : Rp2.711.425.000,-

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Kurniawan
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Andi Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	80 Orang	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 471.834.000
	Jumlah Penguatan Hakim Pengawas Bidang	62 Orang		Rp 978.834.000
	Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	25 Orang		Rp 244.105.000
	Jumlah Penguatan APIP / Consulting	60 Orang		Rp 244.827.000
	Jumlah Pembinaan Sistem Pengaduan	155 Orang		Rp 643.671.000
	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	10 LHP		Rp 107.083.000
	Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	10 LHP		Rp 21.071.000

Jumlah Anggaran : Rp2.711.425.000,-

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH I
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H
Jabatan : Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

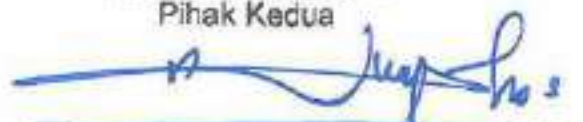
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah I
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.666.704.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 644.665.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 901.486.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 33.390.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	4 LHP		Rp 128.856.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	20 LHP		Rp 31.986.000

Jumlah Anggaran : Rp3.407.087.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH II
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aviantara, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ²⁰ Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah II
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


Aviantara, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.825.285.000
Terselenggaranya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	14 LHP		Rp 441.345.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	25 LHP		Rp 928.866.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa / audit kepegawaian	1 LHP		Rp 28.019.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 96.923.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	25 LHE		Rp 126.995.000

Jumlah Anggaran : Rp3.447.433.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH III
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Iswan Herwin, S.H., M.H
Jabatan : Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua


Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah III
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama


H. Iswan Herwin, S.H., M.H

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.400.472.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	15 LHP		Rp 874.627.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 916.287.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 37.008.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 64.595.000
	Jumlah Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	19 LHE		Rp 31.968.000

Jumlah Anggaran : Rp3.324.957.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INSPEKTUR WILAYAH IV
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum
Jabatan : Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.
Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2019, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Pihak Kedua

Nugroho Setiadji, S.H.

Inspektur Wilayah IV
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Pihak Pertama

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2019 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)	100%		Rp1.247.380.000
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	10 LHP		Rp 563.927.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	13 LHP		Rp 587.797.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 35.264.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 73.352.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	10 LHE		Rp 39.362.000

Jumlah Anggaran : Rp2.547.082.000,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

